

## ANALISIS DETERMINAN KORUPSI DI ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)

Friska Yuana Silaen, Hadi Sasana<sup>1</sup>

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*In central java become widespread corruption in all sector of the local budget, infrastructure, social assistance and education. This study aimed to analyze the effect of GDP per capita, population of women who work, literacy rates and local taxes to corruption in Central Java Province. The data used are secondary data. Secondary data were obtained from the Central Bureau of Statistics and the Commission for the Eradication of Corruption, Collusion and Nepotism (KP2KKN) in Central Java Province. The analysis tool used is multiple regression with SPSS 16.0.*

*The results showed that of the four independent variables, only two variables were significantly positive effect on the GDP per capita corruption and local taxes, whereas no effect was the women who work and literacy rates.*

*Keywords: Corruption, GDP per capita, the population of women who work, literacy rate and local tax*

### PENDAHULUAN

Di Jawa Tengah korupsi telah menyebar luas ke semua sector antara lain anggaran daerah, infrastruktur, bantuan sosial dan pendidikan. Korupsi tertinggi terdapat pada anggaran daerah, selanjutnya penyediaan infrastruktur, bantuan sosial dan pendidikan. Tingginya korupsi yang terjadi di sektor anggaran daerah kontradiktif sangat bertentangan dengan apa yang semestinya terjadi. Sehingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana anggaran tersebut. Korupsi tertinggi kedua terdapat pada aspek penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang baik adalah kunci kemajuan perekonomian suatu daerah.

Korupsi tertinggi ketiga terdapat pada bantuan sosial. Hal ini menjadi baru di wilayah Jawa Tengah. Dimana program bantuan sosial yang ditujukan untuk mensejahterakan dan memajukan dimensi sosial kemasyarakatan, justru yang terjadi adalah korupsi. Sehingga hasil dari bantuan sosial tersebut tidak sampai pada sasaran dan tujuan yang tepat. Dan yang terakhir korupsi pada aspek pendidikan yang disebabkan karena adanya penyelewengan dana pendidikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga berdampak terhadap mutu pendidikan yang semakin menurun (KP2KKN, Jawa Tengah).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri, seharusnya mampu menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dampak negatif dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah korupsi. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka permasalahan yang muncul adalah mengapa terjadi korupsi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal ?

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap korupsi.
2. Menganalisis pengaruh penduduk wanita yang bekerja terhadap korupsi.
3. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap korupsi.
4. Menganalisis pengaruh angka melek huruf terhadap korupsi.

<sup>1</sup>Penulis penanggung jawab

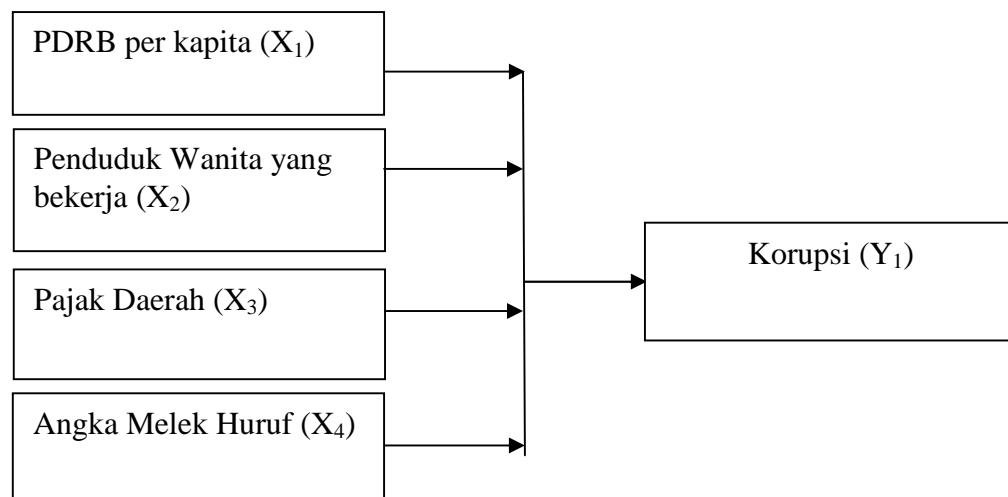
## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa korupsi dipengaruhi oleh empat faktor, antara lain PDRB per kapita, penduduk wanita yang bekerja, angka melek huruf dan pajak daerah. Kemudian variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen (bebas) dan bersama-sama dengan variabel dependen (terikat) yaitu korupsi yang diukur dengan alat analisis regresi berganda dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) untuk mendapatkan tingkat signifikansinya.

Kemudian dengan hasil tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi korupsi. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab korupsi di Jawa Tengah untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara sederhana, penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1



### Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PDRB per kapita diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi
2. Penduduk wanita yang bekerja diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi
3. Pajak daerah diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi
4. Angka melek huruf diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi.

## METODE PENELITIAN

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penulisan (Sevilla, 1993).

### Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan empat variabel independen yaitu PDRB per kapita, penduduk wanita yang bekerja, angka melek huruf dan pajak daerah sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah korupsi di Provinsi Jawa Tengah (Sevilla, 1993).

1. Variabel Dependen  
Variabel dependen (variabel terpengaruh) adalah variabel yang nilainya bergantung pada nilai variabel lain yang merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas. (Marzuki, 2005). Variabel dependen pada penelitian ini adalah korupsi.
2. Variabel Independen  
Variabel independen adalah variabel yang nilainya berpengaruh terhadap variabel lain. Yang menjadi variabel independen adalah:
  - a.) Variabel PDRB per kapita.
  - b.) Variabel Penduduk Wanita yang bekerja.
  - c.) Variabel Pajak Daerah.
  - d.) Variabel Angka Melek Huruf

### Alat Analisis

Untuk mendapatkan estimator yang terbaik, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Analisis regresi linier berganda adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas, yaitu PDRB per kapita ( $X_1$ ), penduduk wanita yang bekerja ( $X_2$ ), pajak daerah ( $X_3$ ), angka melek huruf ( $X_4$ ) terhadap variabel terikat yaitu korupsi ( $Y_1$ ). adalah sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + \beta_4 \text{Log}X_4 + \mu$$

Keterangan :

$\text{Log}Y$  = Korupsi  
 $\text{Log}X_1$  = PDRB per kapita  
 $\text{Log}X_2$  = Penduduk Wanita yang bekerja  
 $\text{Log}X_3$  = Pajak Daerah  
 $\text{Log}X_4$  = Angka Melek Huruf  
 $\beta_0$  = Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_4$  = Koefisien Regresi  
 $\mu$  = Variabel pengganggu

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang dikembangkan sebagai model untuk menghilangkan resiko heteroskedastisitas pada variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2010).

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil pengujian regresi linier berganda dengan dibantu program SPSS dalam proses penghitungannya sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-13.599	1.815		-7.492	.000
Log_PDRB per kapita	1.194	.222	.441	5.390	.000
Log_Penduduk Wanita yang bekerja	.052	.334	.023	.156	.876
Log_Pajak Daerah	.898	.334	.384	4.423	.000
Log_Angka Melek Huruf	.511	.365	.222	1.400	.165

Sumber : Data sekunder diolah, 2012

Pada persamaan regresi pada Tabel di atas dinyatakan dalam *Standardized Coefficients* dengan pertimbangan bahwa ukuran variabel bersifat kualitatif/abstrak, sehingga persamaan Regresi Linier Berganda:

$$\text{Log } Y = -13,599 + 1,194 \log X_1 + 0,052 \log X_2 + 0,898 \log X_3 + 0,511 \log X_4$$

Adapun penjelasan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh PDRB per kapita terhadap korupsi  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita positif dan signifikan yang berarti PDRB per kapita memiliki pengaruh terhadap korupsi yang diikuti dengan adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi, karena yang dikorupsi semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi PDRB per kapita sebesar 0,000 dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,1.
2. Pengaruh penduduk wanita yang bekerja terhadap korupsi  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penduduk wanita yang bekerja tidak signifikan yang berarti penduduk wanita yang bekerja tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi. Dengan demikian penduduk wanita yang bekerja dapat memberikan peran kontrol yang lebih baik sehingga kecenderungannya penduduk wanita yang bekerja lebih taat aturan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi penduduk wanita yang bekerja sebesar 0,876 dimana hasil tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,1.
3. Pengaruh pajak terhadap korupsi  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah positif dan signifikan yang berarti pajak daerah memiliki pengaruh langsung terhadap korupsi. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyelewengan dana pajak demi kepentingan yang bersifat pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pajak daerah sebesar 0,000 dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,1.
4. Pengaruh angka melek huruf terhadap korupsi  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel angka melek huruf tidak signifikan, yang berarti angka melek huruf tidak berpengaruh terhadap korupsi. Hal ini dikarenakan ada atau tidaknya angka melek huruf yang dimiliki seseorang tidak menjadi acuan untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi angka melek huruf sebesar 0,165 dimana hasil tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,1.

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. Berarti bahwa semakin tinggi PDRB per kapita maka akan semakin tinggi kesempatan untuk melakukan korupsi.
2. Variabel penduduk wanita yang bekerja tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi.
3. Variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. Berarti bahwa semakin tinggi pajak yang dibayarkan maka akan semakin tinggi pula korupsinya.
4. Variabel angka melek huruf tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi.

### Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh PDRB per kapita, penduduk wanita yang bekerja, angka melek huruf dan pajak daerah terhadap korupsi. masih banyak faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap korupsi seperti keterbukaan ekonomi (dalam hal ini ekspor-impor). Oleh karena itu diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat

melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan korupsi.

### **Saran**

Terdapat beberapa saran yang diperoleh dari hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam era desentralisasi fiskal dimana daerah dituntut untuk melakukan fungsinya secara efektif dan efisien. Maka harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien di tingkat daerah.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien serta mengatasi terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan:
  - a. Memperbaiki sistem kinerja baik di tingkat pusat maupun daerah secara transparan.
  - b. Kebijakan pemerintah yang tegas serta memperbaiki sistem perundang-undangan sangat diperlukan untuk mengatasi korupsi dalam sistem pemerintahan pusat maupun daerah.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistika, 2009, *Jawa Tengah Dalam Angka 2008-2010*. Semarang.
- Gujarati, Damodar N. Dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2007. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Fahri. 2012. “*Demokrasi Transisi Korupsi*”, Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistematis, Maret 2012. Hal. 36-40.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Klitgaard, Robert. 1988. *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KP2KKN, 2008. *Laporan Monitoring dan Evaluasi kasus-kasus Korupsi dan Penanganan Hukum* di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI.
- Marsyahrul, Tony. 2004. *Pengantar Perpajakan*, PT Gramedia, Jakarta.
- Marzuki. 2005. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Yarma Widya.
- Sasana, Hadi. 2009. “*Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*”, Membangun Kemandirian Daerah. hal. 16-20.
- Sevilla, Consuelo G, et al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Penerbit UI (UI-Press).
- Soewartojo, Juniadi. 1998. “*Korupsi*” (Pola kegiatan dan penindakan serta peran pengawasan). Jakarta: Balai Pustaka.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Wahid. 200. *Jalan Pintas Menguasai SPSS 10,0*. Yogyakarta: Penerbit Andi. hal. 139.
- Surachimin, S.H., M.H. 2004. *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.